BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Semarang



Sumber: Bappeda 2018

Luas wilayah Kota Semarang mencapai 373,70 km² yang terbagi menjadi beberapa bagian di antaranya 334,14 km² bukan lahan sawah serta 39,56 km² tanah sawah. Diketinggian antara 0,75 sampai dengan 348,00 diatas garis pantai Kota Semarang beada serta terletak antara 6°50′-7°10′ Lintang Selatan dan garis 109°35′-110°50′ Bujur Timur. Wilayah administrasi Kota Semarang berbatasan dengan dengan batas- batas wilayah administrasi sebagai berikut :

a. Kabupaten Demak : Sebelah Timur

b. Kabupaten Kendal : Sebelah Barat

c. Kabupaten Kendal : Sebelah Selatan

d. Laut Jawa : Sebelah Utara

Pada tahun 2020, terdapat 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan di Kota Semarang dengan 2 Kecamatannya memiliki wilayah terluas diantaranya 57,55 km² luas wilayah Kecamatan Mijen dan 54,11 km² luas wilayah Kecamatan Gunung Pati. Sebaliknya luas terkecil yaitu 5,93 km² luas wilayah Kecamatan Semarang Selatan dan 6,14 km² luas wilayah Semarang tengah (BPS, 2020).

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Kota Semarang Bulan Juni 2020

T 7	Jenis K	T-4-1		
Kecamatan	Perempuan	Laki- laki	Total	
Semarang Tengah	31,594	29,174	60,768	
Semarang Barat	79,957	77,624	157,581	
Semarang Utara	63,407	61,647	125,054	
Semarang Timur	37,346	35,307	72,653	
Gayamsari	37,094	36,579	73,673	
Gajahmungkur	30,066	29,138	59,204	
Genuk	58,890	59,202	118,092	
Pedurungan	97,882	96,404	194,286	
Candisari	40,575	39,326	79,901	
Banyumanik	71,431	69,892	141,323	
Gunungpati	47,900	47,952	95,852	
Tembalang	91,898	91,202	183,100	
Tugu	17,010	17,120	34,130	
Ngalian	70,578	69,976	140,554	
Mijen	37,942	37,904	75,846	
Semarang Selatan	35,090	33,310	68,400	
Total	848,660	831,757	1,680,417	

Sumber: Dispendukcapil, 2020

Tabel 2.1 merupakan data jumlah penduduk Kota Semarang. Data tersebut menunjukan jumlah penduduk periode Juni 2020 sebanyak 1,680,417 jiwa. Dengan data diatas dapat diketahui penduduk laki-laki sebanyak 831,757 jiwa dengan presentase 49,50%, serta penduduk perempuan sebanyak 848,660 jiwa dengan prsentase 50,50%, Ada pula Kecamatan Pedurungan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota mencapau 194,286 jiwa, dan Kecamatan Tugu dengan jumlah penduduk paling sedikit mencapai 34,130 jiwa.

2.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Semarang

2.2.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Semarang

1. Visi

Dinas perhubungan memiliki visi "Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal dan Tertib di Kota Perdagangan dan Jasa". visi yang memiliki maksud:

- Pertama tansportasi yang memiliki maksud suatu cara yang mencakup berbagai sarana ataupun prasarana serta mendapat dukungan dari tata laksana dan SDM sehingga membentuk suatu jaringan pelayanan dan prasarana.
- Kedua pelayanan handal yang memiliki maksud pengelolaan transportasi secara nyaman, aman, terpelihara, tepat waktu, mencakupi suatu kebutuhan hingga dapat menjangkau seluruh bagian wilayah kota dan mampu memberi dukungan untuk pembangunan kota itu sendiri.

- Ketiga kota perdagangan yang memiliki maksud penyelenggaraan dalam bentuk kegiatan peningkatan ekonomi yang mementingkan sudut perniagaan yang serasi dengan keistimewaan masyarakat kota serta terikat penyelenggaraan berbagai fungsi jasa sehingga mampu membuat tumpuan pembangunan
- Keempat kota jasa yang memiliki maksud kegiatan perdagangan yang berjalan beriringan dengan kegiatan jasa yang berhubungan dengan permasalahan mengenai perniagaan atau suatu prosedur transaksi serta pendistribusian jada dan barang.

2. Misi

Misi digunakan agar visi dapat dijalankan pada Dinas Perhubungan Kota Semarang diantarannya :

- a. Dalam bidang perhubungan dapat membuat perencanaan serta perumusan untuk kebijakan teknis.
- Melakukan pengembangan untuk mewujudkan penyelenggaraan terminal yang baik.
- c. Melakukan pelayanan mengenai transportasi massal diperkotaan serta pelayanan perparkiran agar tetap aman dan nyaman.
- d. Melakukan peningkatan sarana dan prasarana untuk transportasi
- e. Melakukan peningkatan untuk pengujian.

2.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang

1. Tugas

Melakukan berbagai kegiatan Pemda dalam bidang perhubungan urusan Pemerintah Daerah dibidang perhubungan berlandasakan tugas pembantu dan azaz otonomi.

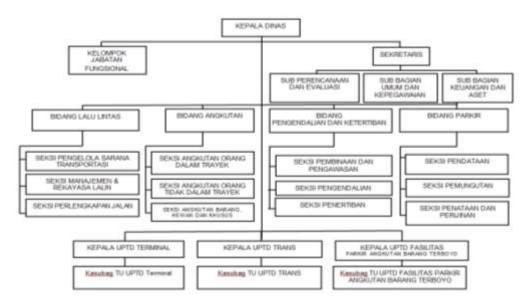
2. Fungsi

- Melakukan formulasi kebijakan teknis dalam berbagai bidang perhubungan darat, laut, serta udara.
- Pembuatan beberpa rencana kegiatan, anggaran serta pelaksanaan kordinasi tugas Dinas Perhubungan
- Melakukan kegiatan pelayanan umum dan pemerintahan dalam bidang perhubungan darat, laut, udara, perparkiran kota, serta keselamatan atau sarana dan prasarana.
- Penyelengaraan kegiatan administasi keuangan, keadaan mengenai pembuatan agenda, penyelenggaraan berbagai warta bidang perhubungan laut, udara, dan darat serta keamanan sarana prasarana, serta mengenai parkiran dilingkungan kota.
- Formulasi kebijakan teknis serta pembimbingan dalam bidang perhubungan
- Melaksanakan bimbingan dalam bidangnya serta menyediakan pembiayaan kelengkapan fasilitas wilayah Kota Semarang.
- Mengimplementaskan tmengenai kajian teknis serta pertanggungjawaban atas rekomendasi dari perijinan atau non perijinan dalam bidang perhubungan.
- Melakukan pembinaan hingga penyusunan laporan pelaksanaan dalam mendukung tugas Dinas Perhubungan Kota Semarang.
- Penyelenggaraan kegitan kesekertariatan Dinas Perhubungan Kota Semarang.
- Penyelenggaraan tugas lainya sesuai dengan bidangnya

2.2.3 Struktur Organisasi

Bagan dan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai berikut :

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2020

Berikut merupakan susunan dari struktur Organisasi diatas diantarannya:

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas yang terdiri dari tiga sub bagian diantaranya sub bagian keuangan dan aset sub bagian perencanaan dan evaluasi, serta sub bagian umum dan kepegawaian. Bidang lalin atau lalu lintas terdiri dari tiga seksi diantaranya seksi perlengkapan jalan manajemen , seksi rekayasa lalu lintas, serta seksi pengelola sarana transportasi. Bidang angkutan yang terdiri dari tiga seksi diantaranya seksi orang tidak dalam trayek, seksi orang dalam trayek, serta seksi barang, hewan serta khusus. Bidang daltib atau pengendalian dan penertiban terdiri dari tiga seksi (penertiban ,pengendalian, serta pembinaan

dan pengawasan). Bidang parkir yang terdiri dari tiga seksi (pemungutan, pendataan, penataan dan perizinan), serta memiliki tiga uptd (terminal, trans semarang, fasilitas)

2.3 Profil Badan Layanan Umum BRT Trans Semarang

2.3.1 Visi dan Misi BLU BRT Trans Semarang

1. Visi

BLU BRT Trans Semarang visi "Menciptakan Pelayanan Bus Transit yang Profesional, Mandiri, Dapat Diandalakan, Berkesinambungan dan Terjangkau" Visi yang ada tersebut mengandung arti sebagai berikut :

- a. Pertama adanya professional, dimana setiap segala kegiatan yang dilakukan di BLU UPTD Trans Semarang akan berorientasi pada pemenuhan standar yang ada.
- Kedua mandiri, dalam hal ini mandiri dalam proses pengelolaan keuangan serta sumber daya manusia di BLU UPTD Trans Semarang.
- c. Ketiga dapat diandalkan, dalam hal ini kepastian untuk pelayanan angkutan umum dalam menunjang mobilitas warga Semarang.
- d. Keempat berkesinambungan, dalam hal ini pelayanan pergantian antar moda untuk meningkatkan aksesbilitas yang ada dalam mencapai lokasi tujuan.
- e. Kelima terjangkau, dalam hal ini penetapan dari besaran retribusi dan tarif atau pungutan lain yang sah menurut perundangan yang telah mempertimbangkandari kemampuan daya beli pengguna jasa.

2. Misi

- a. Pelaksanaan pelayanan *Bus Rapid Transi*t secara terjangkau dan professional
- Melakukan kemandirian dalam pelayanan Bus Rapid Transit dengan prinsip otonomi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manuisa
- c. Untuk mendorong berkembangnya transportasi perkotaan yang dapat diandalkan dan berkesinambungan.
- d. Aadanya keamanan karena pengguna jasa *Bus Rapid Transit* Trans Semarang memperoleh rasa aman dari segala gangguan
- 2.3.2 Tugas, dan Fungsi Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) BRT Trans
 Semarang

1. Tugas Pokok

Tugas dalam melaksanakan kegiatan teknis oprasional Dinas Perhubungan dalam bidang pemeliharaan serta pengelolaan Trans Semarang.

2. Fungsi

- a. Melakukan perencanaan anggaran,program, dan kegiatan
- b. Melakuakan pembaian tugas kepada anggota organisasi lainya
- c. Memberikan bahan ajar kepada anggota organisasi
- d. Menyelesaikan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya
- e. Melakukam kegiatan menyusun sasaran kerja untuk pegawai
- f. Melaksanakan kerjasama dengan instansi ataupun perangkat daerah terkait atas persetujuan dari pimpinan yang bertanggungjawab.

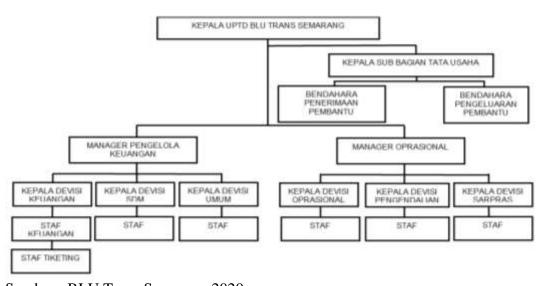
- g. Melaksanakan penyusunan pedoman pengelolaandan pemeliharaan
 Trans Semarang
- Melaksanakan penyusunan rencana, sarana, dan kebutuhan prasarana
 Trans Semarang.
- Melaksanakan operasional dan pengelolaan Trans Semarang berlandaskan peraturan perundangan yang ada
- j. Melaksanakan pengawasan serta pengendalian teknis atas sistem sirkulasi lalu lintas kendaraan
- k. Melaksanakan penyusunan rencana fasilitasi bus dan kebutuhan bangunan
- Melaksanakan pengadaan sarana kebutuhan pengelolaan dan prasarana bus
- m. Pelaksanaan kebersihan, bangunan fisik, dan pemeliharaan taman UPTD Trans Semarang
- n. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah kemudian diberikan ke kas daerah
- o. Melaksanakan keamanan dan ketertiban kendaraan parker dalam trans Semarang dan sekitarnya
- p. Melaksanakan pemeliharaan Trans Semarang
- q. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan monitoring, evaluasi Trans Semarang
- r. Melaksanakan ketatausahaan UPTD Trans Semarang

- s. Melaksanakan dan pelayanan data, kegiatan penyusunan, informasi di UPTD Trans Semarang
- t. Melaksanakan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan pengelolaan di UPTD Trans Semarang
- u. Melaksanakan penilaian kerj anggota organisasi dalam lingkup tanggungjawabnya;
- v. Melaksanakan kegitan, monitoring dan evaluasi program
- w. Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan dan program
- x. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.3.3 Struktur Organisasi BLU BRT Trans Semarang

Bagan dan Susunan Organisasi BLU BRT Trans Semarang sebagai berikut:

Gambar 2.3 Struktur Organisasi BLU BRT Trans Semarang



Sumber: BLU Trans Semarang 2020

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang, terdiri dari :

- a. Kepala UPTD BLU Trans Semarang
- b. Kepala sub bagian tata usaha
 - Bendahara penerimaan pembantu
 - Bendahara pengeluaran pembantu
- c. Manager pengelola keuangan
 - Kepala devisi keuangan
 - a. Staf keuangan
 - b. Staf tiketing
 - Kepala Divisi SDM
 - Kepala divisi umum
- d. Manager Oprasional
 - Kepala divisi oprasional
 - Kepala divisi pengendalian
 - Kepala divisi sarpras

2.3.4 Program Pembayaran Non Tunai

Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang merupakan sistem transportasi umum yang sangat mudah diakses, nyaman, aman dan murah bagi pengguna transportasi umum di wilayah kota Semarang. Serta bagian unggulan dari Dinas Perhubungan Kota Semarang, dimana Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki komitmen untuk membantu masyarakat Kota Semarang memenuhi kebutuhan akan sarana transportasi yang tepat dan manusiawi.

BLU UPTD Trans Semarang memiliki strategi yang untuk mengutamakan kehandalan pelayanan, keselamatan dan keamanan, kemudahan, kenyamanan, dan ekonomis. Konsistensi BLU UPTD Trans Semarang dalam menjalankan strategi dengan berpedoman pada komitmen 3A, yaitu:

- a. Pertama *Affordability* yang artinya harga dan fasilitas lebih murah dibandingkan armada lain.
- b. Kedua Acceptability yang artinya, Keberhasilan BLU UPTD Trans Semarang dalam mengelola 12 koridor merupakan tanda keberhasilan bahwa Bus Rapid Transit yang diterima secara umum dan dan masyarakat membutuhkannya.
- c. Ketiga *Avalaibility* yang artinya, Armada *Bus Rapid Transit* etap beroperasi meskipun pada hari libur nasional seperti hari minggu atau hari libur nasional sehingga pengguna layanan dapat selalu menggunakan *Bus Rapid Transit* sebagai alat transportasinya.

Strategi *Affordability* salah satunya diterapkan dalam harga tiket yang relatif terjangkau dikarenakan mendapatkan subsidi dari pemerintah Kota Semarang. Maka tarif jauh ataupun dekat penumpang cukup membayar penumpang hanya perlu membayar sekali kecuali penumpang meninggalkan halte saat berganti bus. Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2019 mengenai Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 16A Tahun 2017 Tentang Tarip *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Semarang. Dimana tarif dari BRT Trans Semarang,

antaralain Rp 3.500 tarif umum dan Rp 1.000 tarif lanjut usia, veteran, mahasiswa, pelajar, pengguna KIA serta anak dibawah umur lima tahun

Produk pelayanan *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Semarang akan terus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan pendapatan serta menjaga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan bus. Pembayan non tunai merupakan salah satu pelayanan yang didapatkan dalam penggunaan *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Semarang. Media promosi pembayaran non tunai di *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Semarang dilakukan dengan cara Iklan dimana shelter, bodi bud BRT, media sosial dan sponsor berbagai acara tertentu menjadi media untuk mempromosikan pembayaran non tunai di *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Semarang. Serta mengadakan *event* untuk *launching* aplikasi trans semarang, *launching* system pembayaran non tunai.

Pembayaran non tunai di *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Semarang dapat dilakukan menggunakan aplikasi kartu e-tiketing Trans Semarang, Brizzi, BNI TapCash, LinkAja, Gopay, OVO. Semua aplikasi yang digunakan merupakan hasil dari kerjasama dengan pihak ketiga. *Launcing* Aplikasi yang digunakan dalam pembayaran non tunai di *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Semarang sebagai berikut:

Tabel 2.2

Data *Launcing* Aplikasi Pembayaran Non Tunai

No	Aplikasi	Tanggal
1	Brizzi	12 Februari 2017
2	BNI Tapcash	31 Maret 2017
3	Link Aja	18 Agustus 2017
4	Gopay	9 April 2018
5	Ovo	3 September 2018

Sumber: BLU Trans Semarang 2020

Tabel 2.2 merupakan data terkait *launcing* aplikasi pembayaran non tunai oleh BLU Trans Semarang. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa tahun 2017 BLU Trans Semarang launcing dua produk yaitu Brizzi dan BNI Tapcash. Sedangkan pada tahun 2018 BLU Trans Semarang *launcing* produk untuk LinkAja, Gopay, dan Ovo. Hal ini menunjukan bahwa BLU Trans Semarang berusaha menambah aplikasi pembayaran non tunai untuk transaksi dalam *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Semarang.

Adapula *vending* mesin dapat digunakan sebagai alat pembayaan non tunai dimana *vending* mesin merupakan hibah yang diberikan kepada BLU Trans Semarang melalui Dinas Perhubungan Kota Semarang oleh Gopay Indonesia. Hibah tersebut untuk mendukung meningkatkan gerakan *mobail*. Untuk saat ini *vending* mesin ditempatkan pada halte terbaik menurut BLU Trans Semarang yaitu, Halte Simpang Lima, Halte Imam Bonjol, Halte Balaikota, serta Halte Elisabet. Selain *vending* mesin pembayaran tunai maupun non tunai harus menggunakan alat e-tiketing

yang dulunya alat e-ticeting memiliki fungi sebagai alat transaksi, alat absensi petugas, memantau pendapatan, serta melihat kemacetan. Namun saat ini alat e-tiketing hanya digunakan sebagai alat transaksi.

Produk dalam pelayanan *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Semarang akan terus. Berikut ini merupakan tabel realisasi pendapatan *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Semarang periode Januari 2017 – September 2020

Tabel 2.3
Pendapatan Pembayaran Non Tunai di BRT Trans Semarang
(Data Terakhir Bulan September 2020)

Tahun Transaksi	2017	2018	2019	2020
BRT CARD	122.080.640	103.736.689	497.996.184	1.378.410500
BRIZZI	10.679.428	22.394.687	11.683.814	6.141.000
TAP CASH	70.813.664	34.764.228	12.322.814	2.583.500
LINK AJA	1.350.352	30.778.246	37.250.036	177.125.500
GOPAY	-	1.177.354.500	2.754.345.690	416.441.000
ovo	-	8.932.545	44.956.894	43.058.000
Total	204.924.084	1.377.960.895	3.358.555.432	2.023.759.500

Sumber: BLU Trans Semarang 2020

Tabel 2.3 merupakan data pendapatan pembayaran non tunai di *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Semarang. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan tertinggi pembayaran non tunai di *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Semarang terjadi pada tahun 2019

dengan jumlah pendapatan dari pembayaran nontunai di *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Semarang sebanyak 3.358.555.432. Sedangkan jumlah pada tahun 2017 sebanyak 204.924.084, jumlah pada tahun 2018 sebanyak 1.377.960.895, dan jumlah pada tahun 2020 sebanyak 2.023.759.500 Tabel 2.3 juga menunjukan bahwa terjadi penurunan pendapatan dari tahun 2019 ketahun 2020.

Secara umum penumpang *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans
Semarang mendapatkan layanan untuk pembayaran tiket *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Semarang. Layanan pembayaran yang diberikan
BLU *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Semarang mengunakan dua cara
yaitu dengan pembayaran tunai dan pembayaran non tunai. Berikut tabel
penguna layanan pembayan non tunai:

Tabel 2.4

Jumlah Penguna Layanan Pembayaran Non Tunai

Tahun Transaksi	2017	2018	2019	2020
BRT CARD	58.201	44.051	201,521	497,753
BRIZZI	3.837	7.545	3,959	1,946
TAP CASH	27.819	12.078	4,243	851
LINK AJA	534	9.608	11,403	52,483
GOPAY	1	356.247	860,974	127,551
OVO	1	3.053	14,922	13,263
Total	90.391	432.582	1.097.022	693.847

Sumber: BLU Trans Semarang 2020

Tabel 2.4 merupakan data penguna layanan pembayaran non tunai di *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Semarang. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penguna layanan pembayaran non tunai tertinggi pembayaran non tunai di *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Semarang terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah penguna layanan pembayaran non tunai di *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Semarang sebanyak 1.097.022 orang. Jumlah penguna layanan pembayaran non tunai pada tahun 2017 sebanyak 90.391 orang, jumlah penguna layanan pembayaran non tunai pada tahun 2018 sebanyak 432.582 orang, dan jumlah penguna layanan pembayaran non tunai pada tahun 2020 sebanyak 693.847 orang. Penguna layanan pembayaran non tunai di *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Semarang Hal ini terus meningkat dari tahun ke tahun yang menunjukkan minat masyarakatuntuk menggunakan layanan pembayaran non tunai kian bertambah. Walaupun Tabel 2.4 juga menunjukan bahwa terjadi penurunan penguna layanan pembayaran non tunai dari tahun 2019 ketahun 2020.